



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dan alat kendali bagi peningkatan kinerja. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tahun 2023 dengan harapan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda pada tahun-tahun selanjutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Samarinda, 28 Februari 2024

Kepala BPKAD



H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024. Selain itu LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKIP BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan Laporan yang disusun setiap tahun dan mempunyai tujuan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja tujuan dan sasaran strategis, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjelasan atas pencapaian kinerja. Selain itu penyusunan laporan kinerja juga menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan layanan publik bagi Badan Publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama tahun 2024 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/ hambatan selama 1 (satu) tahun. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Perwali Samarinda 121-2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kota Samarinda, antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan

dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BPKAD Kota Samarinda LAKIP Tahun 2024 Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda berpedoman pada Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Samarinda 2021-2026. Berpedoman pada hal tersebut, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda dalam rangka memberikan kepastian arah dan gerak pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ingin dicapai sebagai berikut : Visi Kota Samarinda “Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban “ dan untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang harus dilaksanakan yang pertama “Mewujudkan Masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya”, yang kedua “Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan”, yang ketiga “Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi”, yang keempat “Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern”, yang kelima “Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari”, Secara umum capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2024 telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja-BPKAD) dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Samarinda, 28 Februari 2024

Kepala BPKAD

H.Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sumber Daya Aparatur	11
F. Aspek Strategis Organisasi	13
G. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	14
H. Sarana dan Prasarana Kerja	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Visi	17
C. Misi	17
D. Tujuan	18
E. Sasaran	19
F. Indikator Kinerja	19
G. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	22
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	23
C. Analisis Capaian Kinerja	26
D. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Rencana Tindak Lanjut	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Organisasi BPKAD Kota Samarinda.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian	12
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal	12
Tabel 2.1	Sasaran dan Strategi BPKAD	17
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BPKAD Kota Samarinda	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024.....	20
Tabel 3.1	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	22
Tabel 3.2	Hasil Pencapaian Sasaan Strategi BPKAD Tahun 2024	27
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Lampiran 2	Pohon Kinerja dan Cascading Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu sarana penting dalam mengukur dan menilai kinerja serta akuntabilitas suatu instansi pemerintah, baik dari segi pencapaian tujuan, pelaksanaan program, serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun LAKIP 2024 dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pada tahun 2024, BPKAD terus berkomitmen untuk mendukung tercapainya visi dan misi daerah melalui pengelolaan keuangan dan aset yang profesional, akuntabel, dan transparan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BPKAD telah melaksanakan berbagai kebijakan, program, serta kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

LAKIP 2024 ini menyajikan informasi mengenai kinerja BPKAD selama periode tahun 2024, mencakup pencapaian program, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, laporan ini juga menggambarkan sejauh mana BPKAD berhasil dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat, guna terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Penyusunan LAKIP merupakan bagian dari kewajiban setiap instansi pemerintah, yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan pembangunan daerah. BPKAD tidak hanya mengelola anggaran dan aset, tetapi juga bertugas untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada tahun 2024, pengelolaan keuangan dan aset daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan perubahan kebijakan dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk itu, penting bagi BPKAD untuk menyusun LAKIP yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul.

LAKIP 2024 BPKAD disusun dengan tujuan untuk memberikan laporan yang jujur dan transparan mengenai kinerja instansi, serta untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaporkan hasil kerjanya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap BPKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, laporan ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang, sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda dapat mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas keuangan negara, yang juga berlaku untuk daerah.

2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Menyebutkan kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah**

Mengatur tentang mekanisme penyusunan laporan keuangan dan kinerja di instansi pemerintah, termasuk tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

Merupakan pedoman yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk pelaporan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

5. **Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Samarinda**

Ini adalah regulasi yang lebih spesifik mengatur pengelolaan keuangan daerah di Kota Samarinda, yang menjadi dasar operasional bagi BPKAD Samarinda dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja, termasuk LAKIP.

Secara umum, LAKIP merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui LAKIP, instansi pemerintah, termasuk BPKAD, bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan **Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021** yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. BPKAD memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di pemerintah daerah. Berikut adalah tugas dan fungsi BPKAD secara umum:

a. Fungsi Secara Umum :

- 1) Menyusun Rencana Menyusun rencana Strategik Badan berdasarkan Perencanaan Strategik Pemerintah Kota Samarinda.
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 3) Pemberi dukungan atas penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 4) Pembinaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.
- 7) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota
- 8) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

b. Fungsi Secara Khusus :

- 9) Menyusun Rencana APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- 10) Melaksanakan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 11) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD.
- 12) Menyusun kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBD.
- 13) Menyiapkan Anggaran Kas.
- 14) Mengesahkan Anggaran DPA / DPPA SKPD.

- 15) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah.
- 16) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- 17) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk.
- 18) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 19) Menyajikan informasi keuangan daerah.
- 20) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Tugas utama BPKAD adalah menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mencakup berbagai aspek administrasi dan pengawasan. Tugas-tugas tersebut antara lain:

1. **Perencanaan Keuangan Daerah:** BPKAD bertugas untuk merencanakan kebutuhan anggaran daerah dan menyiapkan dokumen perencanaan keuangan.
2. **Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah:** BPKAD mengelola alokasi dan pelaksanaan anggaran serta memastikan agar belanja daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Pengelolaan Aset Daerah:** BPKAD bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah, termasuk inventarisasi, pengamanan, dan pengawasan penggunaan aset.
4. **Penyusunan Laporan Keuangan Daerah:** BPKAD harus menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. **Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan:** Menjalankan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Secara keseluruhan, **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pembangunan daerah.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) Kepala Sub.Bidang dan berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional terjadi beberapa penyetaraan pada jabatan administrasi ke jabatan fungsional sehingga terdapat 6 (enam) jabatan yang disetarakan yakni 2 (dua) Kasubbag dan 4 (empat) Kasubbid menjadi Jabatan Fungsional yang secara lengkap Struktur Organisasi pada BPKAD Kota Samarinda dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KOTA SAMARINDA



Untuk melaksanakan fungsinya, maka struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, meliputi :
 - 1) Sub Bagian Umum & Kepegawaian
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Anggaran, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Anggaran 1
 - 2) Sub Bidang Anggaran 2
- d. Bidang Perbendaharaan, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan 1
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan 2
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Akuntansi, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Akutansi 1
 - 2) Sub Bidang Akutansi 2
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Aset, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Aset 1
 - 2) Sub Bidang Aset 2
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan

Sebagai kepala pimpinan utama mempunyai tugas menyusun kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Samarinda, mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas, menyusun anggaran daerah dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan evaluasi dan pelaporan terkait penggunaan anggaran dan aset daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada pemerintah kota.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan lingkup SKPD BPKAD berupa perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan Masyarakat; Penyiapan bahan/koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan Pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran; Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran; Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran I dan sub bidang anggaran II; Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sub bidang anggaran I, dan sub bidang anggaran II; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perbendaharaan; Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perbendaharaan; Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang pengelolaan kas daerah; Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang perbendaharaan I, sub bidang perbendaharaan II dan jabatan fungsional; Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan kas daerah, perbendaharaan I, perbendaharaan II dan jabatan fungsional; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut, Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang akuntansi; Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang akuntansi; Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi pendapatan; Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub akuntansi belanja; Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub akuntansi pelaporan; Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan subbidang akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi pelaporan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

f. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid Aset mempunyai fungsi sebagai berikut Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah; Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengelolaan barang milik daerah; Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah; Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah; Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub evaluasi dan pelaporan barang milik daerah; Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penggunaan dan pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional (JF)

Jabatan Fungsional (JF) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan. Kategori JF terdiri atas JF keahlian dan JF keterampilan. JF keahlian tersebut ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Sedangkan JF keterampilan ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, didukung oleh sistem informasi dan fasilitas yang menunjang transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peran mereka sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**).

Sumber daya aparatur di **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)** merujuk pada tenaga kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah serta aset pemerintah. Aparatur di BPKAD memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Komponen Sumber Daya Aparatur di BPKAD:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas dalam administrasi keuangan daerah.
- Pegawai. honorer atau tenaga kontrak yang mendukung operasional harian.

2. Kompetensi dan Keahlian

- Keahlian dalam akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
- Pemahaman tentang regulasi keuangan, seperti **Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah**.
- Kemampuan dalam penggunaan **Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)** dan aplikasi terkait.

3. Fasilitas dan Infrastruktur

- Perangkat komputer dan sistem informasi keuangan.
- Kantor dan ruang kerja untuk operasional administrasi.
- Sistem keamanan data untuk menjaga integritas informasi keuangan daerah.

4. Tanggung Jawab Aparatur di BPKAD

- Menyusun anggaran daerah (**APBD**).
- Mengelola pendapatan dan belanja daerah.
- Mengawasi dan mencatat penggunaan aset daerah.

- o Menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- o Berkoordinasi dengan **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** untuk audit dan transparansi keuangan.

Adapun Sumber Daya Aparatur (SDA) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	69 orang
2.	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	22 orang
3.	Pegawai Tidak Tetap Harian	32 orang
Jumlah		121 Orang

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Jumlah
1	2	3
1.	Pegawai Negeri Sipil	
	a. Doktor	-
	b. Magister	16 orang
	c. Sarjana	20 orang
	d. Diploma	10 orang
	e. SMU/SMK/KPAA	23 orang
	f. SLTP	-
	g. SD	-
	Jumlah 1	69 orang
2.	Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB)	
	a. Doktor	-
	b. Magister	3 Orang
	c. Sarjana	12 Orang
	d. Diploma	1 Orang
	e. SMU/SMK/MA	6 Orang
	f. SLTP	-
	g. SD	-
	Jumlah 2	22 orang

1	2	3
3.	Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTH) (disetarakan dengan SLTA)	0 orang
	a. Doktor	-
	b. Magister	-
	c. Sarjana	13 Orang
	d. Diploma	1 Orang
	e. SMU/SMK/KPAA	16 Orang
	f. SLTP	2 Orang
	e. SD	1 Orang
	Jumlah 3	33 Orang
	Jumlah 1 + 2 + 3	124 Orang

F. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam **Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021** tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda. BPKAD Kota Samarinda membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut adalah beberapa aspek strategis organisasi BPKAD Kota Samarinda:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: BPKAD bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis yang mendukung fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian: BPKAD melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pengeluaran dan penerimaan, serta pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan aset daerah.

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan: BPKAD bertugas melaksanakan kebijakan teknis terkait pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Pengelolaan Aset Daerah: BPKAD memiliki peran penting dalam pengelolaan aset daerah, termasuk inventarisasi, penilaian, dan pengawasan penggunaan aset untuk memastikan optimalisasi pemanfaatannya bagi kepentingan publik.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan: BPKAD berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholders lainnya melalui pengembangan sistem informasi manajemen keuangan yang modern dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dengan menjalankan aspek-aspek strategis tersebut, BPKAD Kota Samarinda berupaya mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

G. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi tolak ukur (benchmark) dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi (permasalahan) yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan berpotensi memberikan pengaruh negatif bagi layanan kepada masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi, antara lain:

1. Pengelolaan dan Sertifikasi Aset Daerah:
 - o Pengamanan Aset Tanah: BPKAD Kota Samarinda menghadapi tantangan dalam mengamankan aset tanah milik pemerintah kota. Tercatat, berdasarkan data tahun 2022, terdapat sekitar 1.000 lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh pemerintah kota. Namun, pengawasan dan

pengamanan terhadap aset-aset ini memerlukan koordinasi yang lebih intensif antara BPKAD dengan kecamatan dan kelurahan untuk mencegah penyalahgunaan atau klaim oleh pihak lain.

- Sertifikasi Aset: Proses sertifikasi aset, khususnya tanah, menjadi fokus utama BPKAD. Kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diupayakan untuk mempercepat penyelesaian sertifikat aset tanah milik daerah, guna memastikan legalitas dan perlindungan hukum terhadap aset-aset tersebut.
2. Ketersediaan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM):
 - Keterbatasan SDM: BPKAD Kota Samarinda menghadapi permasalahan terkait ketersediaan SDM yang memadai dalam penatausahaan aset tetap. Keterbatasan ini dapat berdampak pada efektivitas pengelolaan aset dan upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.
 3. Konsistensi Penyusunan Anggaran dan Dokumen Perencanaan:
 - Sinkronisasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang kurang optimal dapat mempengaruhi konsistensi dan sinkronisasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran.
 4. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan:
 - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Meskipun Pemerintah Kota Samarinda telah berhasil meraih opini WTP, upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan terus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi proses perencanaan dan penganggaran, serta penguatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian, BPKAD Kota Samarinda dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

H. Sarana dan Prasarana Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk mendukung operasionalnya, BPKAD dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana kantor yang memadai. Berikut adalah beberapa informasi terkait:

1. Lokasi Kantor BPKAD Kota Samarinda beralamat di Jl. Dahlia, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 7524
2. Gedung Kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dengan fasilitas pendukungnya. Dapat digunakan untuk rapat-rapat skala menengah maupun untuk pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional BPKAD.
3. Fasilitas perkantoran yang relative telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Mobiler
 - Komputer,yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis
 - Fasilitas Telekomunikasi
 - Dan lain-lain
4. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2021-2026 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Tahun 2024 BPKAD Kota Samarinda melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan, 63 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis melalui perjanjian kinerja yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Sasaran dan Strategi BPKAD

Sasaran	Strategi
Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

B. Visi

Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Pemerintah Kota Samarinda Upaya menyelaraskan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka telah dirumuskan Visinya BPKAD Kota Samarinda sebagai berikut :

“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”

C. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi atau suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun Misi BPKAD Kota Samarinda sebagai berikut :

- MISI :**
- 1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya.**
 - 2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.**
 - 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi rakyat.**
 - 4. Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern.**
 - 5. Mewujudkan Kota dengan lingkungan yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.**

Dari Visi dan Misi Kota Samarinda yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama Keuangan dan Aset Daerah, bahwa Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan BPKAD yang terkait dan sesuai dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda adalah **Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, akuntabel dan bebas Korupsi**, dengan tujuan **Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel**, dengan sasaran **Meningkatnya Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja**, dengan menggunakan Strategi yang terkait yaitu **Reformasi Birokrasi dan penguatan tatakelola Pemerintahan** serta menuju arah kebijakan **Peningkatan peran dan kinerja Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah** yang telah sejalan dan searah dengan Visi, Misi serta Program Pembangunan Pemerintah Kota Samarinda.

D. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat Pembangunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat menunjukan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan LAKIP BPKAD Kota Samarinda adalah:

“Meningkatnya Pelayanan Yang Akuntabel”

Dengan demikian, tujuan utama dari LAKIP BPKAD Kota Samarinda adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sebagai sarana untuk evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

E. Sasaran

Sasaran BPKAD Kota Samarinda adalah merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Samarinda dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Adapun Sasaran yang ingin dicapai BPKAD Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja”

F. Indikator Kinerja

Dengan mempertimbangkan dokumen pendukung dalam rangka penetapan Indikator Kinerja pada BPKAD Kota Samarinda, maka sebagai berikut :

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BPKAD Kota Samarinda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
				2023	2024
1.	Meningkatkan Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	W T P	W T P

G. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada BPKAD Kota Samarinda tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3**Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	WTP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPKAD kota Samarinda. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan *clean governance*. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat kepada masyarakat.

Laporan kinerja satuan kerja perangkat daerah terdiri dari program/kegiatan, belanja (anggaran dan realisasi) serta output (rencana, realisasi dan satuan). Penjelasan mengenai nilai capaian sasaran yang dihubungkan dengan nilai capaian kinerja kegiatan, analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang akan dihadapi dan strategi yang akan diambil untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Untuk Mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah Satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintah yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap Instansi Pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan Kinerja serta tindakan seseorang, Badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Peningkatan /Penurunan Pencapaian
1	Perencanaan Kinerja	30	22,72	21,25	(1,47)
2	Pengukuran Kinerja	30	17,95	13	(4,95)
3	Pelaporan Kinerja	15	11,50	7,5	(4)
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	9,25	9	(0,25)
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,42	50,75	(10,67)
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	CC	

Pada tabel 3.1 dapat dilihat nilai SAKIP BPKAD Kota Samarinda tahun 2022 dan tahun 2023 serta peningkatan/penurunan pencapaiannya. Pencapaian tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (10,67) dengan komponen perencanaan kinerja menurun sebesar 1,47, komponen pengukuran kinerja menurun 4,95, komponen pelaporan kinerja menurun sebesar 4, komponen evaluasi internal menurun sebesar 0,25 dengan hasil akhir diperoleh tingkat akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Samarinda yang semula pada tahun 2022 berkategori B menjadi kategori CC pada tahun 2023.

2. Uraian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian Kinerja

a) Perencanaan Kinerja

Penilaian Perencanaan Kinerja meliputi tiga sub komponen perencanaan kinerja, yaitu dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

b) Pengukuran Kinerja

Penilaian pengukuran komponen kinerja meliputi tiga sub komponen pengukuran kinerja yaitu pemenuhan pengukuran kinerja, kualitas pengukuran kinerja dan implementasi pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.

c) Pelaporan Kinerja

Penilaian terhadap komponen pelaporan kinerja meliputi tiga sub komponen yaitu pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penilaian terhadap komponen evaluasi kinerja meliputi tiga sub unsur komponen, yaitu pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, pemanfaatan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Hasil evaluasi laporan bidang-bidang terkait dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya berupa Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan usulan Musrenbang Kota Tahun 2024. Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Seluruh indikator pencapaian kinerja dari rencana yang ditetapkan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 98,70%, indikator ini tergolong sebagai nilai yang "BAIK", atau tepatnya tercapai dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Namun dilihat dari sisi situasi dan kondisi yang terjadi pada Tahun 2024, setiap program kegiatan yang dilaksanakan memiliki hambatan dan kendala yang harus dicari solusinya guna perbaikan kinerja setiap personil pada BPKAD pada waktu mendatang atau menjadi tugas lanjutan dari masing-masing bidang di instansi BPKAD. Ada beberapa catatan kendala dan hambatan dari bidang-bidang yang telah terangkum, yakni :

Pertama, Bidang Anggaran, bahwa sebagian besar dari SKPD yang ada di Pemerintah Kota Samarinda masih belum dapat menyusun kebutuhan penarikan dana anggaran yang tergambar dalam Anggaran Kas Pemerintah Kota Samarinda, sehingga menyulitkan dalam operasional penyusunannya dan perlu adanya pengarahan dan pemantauan ekstra.

Kedua, Bidang Perbendaharaan, bahwa karena keterbatasan dana anggaran, maka:

- a. Kurangnya peralatan atau sarana prasarana kantor berupa : komputer, printer, UPS, dan untuk back up data, karena barang yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak ada perbaikan atau penggantian.
- b. Sudah lama atau sudah sekitar 6 (Enam) tahun tidak ada pendidikan dan pelatihan untuk kaderisasi calon bendahara yang biasanya diselenggarakan oleh Badan Diklat dan Litbang guna menduduki jabatan fungsional bendahara. Hal tersebut sangat penting, karena banyak personil SKPD yang tidak memahami atau mengerti ilmu dasar untuk menjadi seorang bendahara.
- c. Secara internal, bagi personil bidang juga perlu pendidikan dan pelatihan guna lebih mengasah atau menyegarkan kembali pelayanan publik.
- d. Tahun 2020 dan tahun sebelumnya bidang perbendaharaan tidak melaksanakan Sosialisasi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan informasi-informasi penting dan menyampaikan beberapa perubahan dalam administrasi pencairan anggaran.
- e. Mengenai kerjasama dengan pihak bank daerah, tentang keluar masuk kas daerah sudah lebih lancar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena adanya beberapa perbaikan sistem.

Ketiga, Bidang Akuntansi, seputaran tentang peningkatan sumber daya manusia, bahwa :

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Keuangan hampir di seluruh SKPD belum maksimal, sehingga ada beberapa tugas yang seharusnya menjadi tugas SKPD dalam menyusun Laporan Keuangan untuk sementara waktu ditangani oleh bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (BPKAD). Diharapkan perlu adanya pada setiap SKPD untuk ditempatkan personil yang

memiliki latar belakang atau kemampuan di Bidang Akuntansi khususnya penyusunan laporan keuangan.

Keempat Bidang Aset, juga **tentang** keterbatasan dana anggaran, maka:

- a. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia pengurus barang pada setiap SKPD, agar pengurusan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah lebih mudah dan lebih lancar.
- b. Sistem aplikasi Simda Barang belum online secara penuh atau masih manual (masih per kecamatan).
- c. Jumlah rentang kendali yang cukup besar, artinya bahwa perbandingan jumlah lahan yang diawasi dengan personil pegawai yang menangani tidak seimbang (luas lahan sangat besar, sedangkan personil pengawas sangat minim).
- d. Anggaran biaya pengamanan aset sangat minim.
- e. Kebanyakan lokasi tanah pemerintahan sangat jauh dan sulit dijangkau.

Kelima, Bidang Peralatan dan Perlengkapan, yang pada awal Tahun 2023 dengan penyelarasan Struktur organisasi dan Tenaga Kerja baru Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsinya dilebur dari 1 (satu) bidang menjadi 1 (satu) sub bidang pada Bidang Aset. Dengan alasan yang setara dengan bidang lain, yaitu keterbatasan dana anggaran, maka :

- a. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD terutama instansi yang renovasi gedung maupun pindah gedung tidak dapat dipenuhi.
- b. Pembayaran hutang pada pihak ketiga Tahun 2019 yang dibayarkan telah terlaksana dengan baik.

Terwujudnya Standart Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Keuangan dan aset yang sudah terpublikasi, indikator kinerjanya Prosentase prosedur dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan Keuangan dan aset. Dapat dibuktikan melalui terwujudnya Berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2021 – 2026, ada sasaran kinerja yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja BPKAD, namun dalam pelaksanaan kinerja SKPD tetap dilaksanakan dengan nilai obyektif “BAIK”, yakni :

Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan dan aset melalui web dan jaringan bagi seluruh SKPD, indikator kinerjanya Persentase SKPD yang sudah mengelola keuangan dan aset melalui sistem berbasis Informasi Teknologi. Hal tersebut juga dapat dibuktikan melalui : terwujudnya penggunaan anggaran yang tepat sesuai dengan skala prioritas dan tolak ukur serta target kinerja yang telah ditentukan. Walaupun dengan kondisi yang masih belum banyak berubah dari tahun sebelumnya.

Mutu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan perundang-undangan, Hal tersebut juga terbukti dengan meningkatnya peringkat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada tahun sebelumnya menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2015, selanjutnya Tahun 2021 Pemerintah Kota Samarinda dapat mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tersebut, walaupun dengan kondisi keuangan daerah yang minim.

Menyelenggarakan Sistem informasi yang berbasis aktual dan mudah di akses oleh Publik, indikator kinerjanya Tersusunnya laporan dan perencanaan keuangan dan aset yang berbasis aktual dan terpublikasi pada Web Kota Samarinda. Hal tersebut dapat dilihat dari : terciptanya aksesibilitas publik terhadap produk-produk pengelolaan keuangan yang secara umum terealisasi 100% dan sesuai dengan rencana dan harapan yang ditetapkan.

C. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan capaian 5 tahun terakhir periode Renstra BPKAD Tahun 2021-2026 yang akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Secara keseluruhan dari hasil pencapaian Sasaran Strategis BPKAD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2

Hasil Pencapaian Sasaran Strategis BPKAD Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Tingkat Capaian Sasaran		
					B	C	K
Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	opini	√		

(B= Baik, C= Cukup, K= Kurang)

Tingkat Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut. Secara Umum sasaran strategis dapat digambarkan berhasil dengan baik, cukup, atau kurang berhasil diwujudkan. Untuk nilai yang baik dapat dipertahankan maupun ditingkatkan, sedangkan yang memiliki nilai cukup dan kurang, dicari penyebabnya, selanjutnya dicari solusi ataupun penyelesaian dari beberapa hambatan atau permasalahan yang timbul atau efek dari nilai yang minim tersebut.

D. Realisasi Anggaran

Pada tataran sistem pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran lebih tinggi dari pada pencapaian program dan kegiatan, karena program merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program dan Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
				Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55,324,202,672	65,641,419,077	64,588,824,563	99.53	98.40
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250,000,000	316,325,000	315,383,600	100	99.70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125,000,000	187,575,000	187,198,600	100	99.80
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75,000,000	68,250,000	67,955,000	100	99.57
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	60,500,000	60,230,000	100	99.55
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34,244,319,442	36,822,473,847	36,321,427,305	99.18	98.64
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31,654,456,177	34,793,579,968	34,308,779,879	99.17	98.61
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,539,863,265	1,959,393,879	1,943,173,376	99.42	99.17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	69,500,000	69,474,050	98.23	99.96
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,550,000,000	5,991,712,000	5,825,270,434	99.87	97.22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	300,000,000	365,000,000	356,891,900	100	97.78
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,900,000,000	2,595,712,000	2,589,932,100	100	99.78
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350,000,000	451,000,000	442,968,000	100	98.22
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	800,000,000	1,380,000,000	1,379,735,000	100	99.98
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	50,000,000	10,000,000	9,990,000	100	99.90
Fasilitas Kunjungan Tamu	250,000,000	270,000,000	262,000,000	97.04	97.04
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900,000,000	920,000,000	783,753,434	100	85.19

1	2	3	4	5	6
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,700,000,000	1,700,000,000	1,699,490,300	100	99.97
Pengadaan Mebel	1,700,000,000	1,700,000,000	1,699,490,300	100	99.97
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,729,883,230	4,274,058,230	3,934,074,659	100	92.05
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,211,175,800	1,286,175,800	1,263,329,209	100	98.22
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,518,707,430	2,987,882,430	2,670,745,450	100	89.39
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,850,000,000	16,536,850,000	16,493,178,265	100	99.74
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau kendaraan Dinas Jabatan	450,000,000	510,000,000	493,759,500	100	96.82
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,000,000,000	1,479,400,000	1,478,185,200	100	99.92
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	1,100,000,000	1,551,450,000	1,548,854,480	100	99.83
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,500,000,000	8,700,000,000	8,685,969,655	100	99.84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	3,800,000,000	4,296,000,000	4,286,409,430	100	99.78
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	32,625,411,590	10,993,128,465	9,851,955,761	90.13	89.62
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3,038,679,400	2,661,190,274	2,526,496,174	94.94	94.94
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	187,872,200	174,872,200	173,371,000	99.14	99.14
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	181,770,100	165,410,791	163,225,500	98.68	98.68
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	325,608,100	223,974,100	205,025,250	91.54	91.54
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	128,949,200	113,029,200	110,691,000	97.93	97.93
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	109,694,400	99,821,904	97,436,500	97.61	97.61
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	58,733,300	53,447,303	52,253,400	97.77	97.77
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	347,149,500	315,906,045	313,173,746	99.14	99.14
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	281,887,500	256,517,625	216,336,534	84.34	84.34
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	744,088,500	645,847,900	589,681,750	91.30	91.30
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	672,926,600	612,363,206	605,301,494	98.85	98.85

1	2	3	4	5	6
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2,831,044,440	3,576,250,441	3,536,239,332	99.90	98.88
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	53,045,000	48,270,950	48,181,500	100	99.81
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53,045,000	48,270,950	48,236,000	100	99.93
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	370,890,640	417,510,482	410,056,532	99.21	98.21
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	53,045,000	48,270,950	46,565,000	100	96.47
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	179,209,350	163,080,509	161,681,666	99.88	99.14
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	658,754,000	939,466,140	923,356,777	100	98.29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	106,090,000	146,541,900	146,259,000	100	99.81
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	53,045,000	48,270,950	48,210,000	100	99.87
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	429,664,500	470,994,695	462,265,965	99.98	98.15
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	715,120,950	850,760,065	847,106,596	100	99.57
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	159,135,000	394,812,850	394,320,296	100	99.88
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2,018,362,250	2,477,922,250	2,413,757,559	99.28	97.41
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	315,617,750	315,617,750	314,874,050	100	99.76
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	159,135,000	185,235,000	185,182,501	100	99.97

LAKIP BPKAD KOTA SAMARINDA 2024

1	2	3	4	5	6
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	106,090,000	141,700,000	132,176,870	100	93.28
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	424,360,000	638,355,000	608,959,914	97.23	95.40
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	53,045,000	0	0	0.00	0.00
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	106,090,000	134,160,000	133,814,600	99.99	99.74
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	111,394,500	226,614,500	220,303,000	99.98	97.21
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	530,450,000	624,060,000	618,740,777	99.99	99.15
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	212,180,000	212,180,000	199,705,847	100	94.12
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	24,000,000,000	1,500,000,000	609,253,467	38.08	40.62
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	24,000,000,000	1,500,000,000	609,253,467	38.08	40.62
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	737,325,500	777,765,500	766,209,229	100	98.51
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	368,662,750	387,802,750	377,894,329	100	97.44
Pembinaan System Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	368,662,750	389,962,750	388,314,900	100	99.58
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	74,998,000,000	98,115,739,640	74,237,218,854	72.06	75.66
Pengelolaan Barang Milik daerah	74,998,000,000	98,115,739,640	74,237,218,854	72.06	75.66
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	26,350,727,000	31,161,640,400	31,086,291,765	99.84	99.76
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	216,169,000	106,713,790	104,221,556	97.67	97.66
Penatausahaan Barang Milik Daerah	15,141,791,000	22,792,550,960	22,502,174,008	82.90	98.73
Inventarisasi Barang Milik Daerah	441,495,000	456,760,450	453,873,115	97.06	99.37
Pengamanan Barang Milik Daerah	28,712,728,000	39,458,142,140	16,100,281,268	40.90	40.80
Penilaian Barang Milik Daerah	2,328,860,000	2,411,262,600	2,372,902,600	98.93	98.41
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	472,645,000	475,106,950	457,774,000	97.27	96.35
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	435,505,000	436,309,550	398,844,772	92.05	91.41
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	898,080,000	817,252,800	760,855,770	92.77	93.10

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda Timur Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) program kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Perangkat Daerah (PD) setiap akhir tahun anggaran.

LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden RI PERPRES No.29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana telah berjalan sesuai dengan harapan.

Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan Kinerja yang terus ditingkatkan dan dipertahankan untuk masa mendatang.

B. Rencana Tindak Lanjut

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda, akan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.

Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024 akan dievaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah ke depan.

Samarinda, 28 Februari 2024
Kepala BPKAD

H.Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balai Kota, Telp. 0541-733926 Fax. 0541-733986

SAMARINDA

Kode pos:75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IBROHIM, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANDI HARUN**
Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA**

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 15 Januari 2024

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004
Pembina Utama Muda / IVc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	WTP

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota	Rp	55.324.202.672,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	32.625.411.590,00
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	74.998.000.000,00
JUMLAH		Rp	162.947.614.262,00

PIHAK KEDUA,



ANDI HARUN

PIHAK PERTAMA,



IBROHIM, SE, M.Si
 NIP. 19650502 198902 1 004
 Pembina Utama Muda / IVc



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAYITNO, SE.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : IBROHIM, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

PRAYITNO, SE.,M.Si
NIP. 19710732 200502 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAYITNO, SE.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : IBROHIM, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,


IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004

PIHAK PERTAMA,


PRAYITNO, SE.,M.Si
NIP. 19710732 200502 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASMIRANDA MARLINA, SE ., M.Si**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **IBROHIM ,SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004

PIHAK PERTAMA,

ASMIRANDA MARLINA, SE
NIP. 19800312 200701 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	1.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Jenis
		2.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan yang Disediakan	4.800 surat kabar
		3.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konultasi SKPD	50 SPPD
		4.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	66 Unit

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.250.000.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	300.000.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	50.000.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	900.000.000
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		450.000.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	450.000.000
JUMLAH		Rp	1.700.000.000



Sekretaris
 BPKAD Kota Samarinda,
 BROHIM, SE, M.Si
 NIP. 19650502 198902 1 004

Kasubbag Umum
 BPKAD Kota Samarinda,

ASMIRANDA MARLINA, SE
 NIP. 19800312 200701 2 007



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDIASARI AGUSTINI, SE, M.Si**

Jabatan : Pejabat Fungsional

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **IBROHIM, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

WIDIASARI AGUSTINI, SE, M.Si
NIP. 19670801 200003 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen
		2.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
		3.	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		250.000.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	125.000.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	75.000.000
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	50.000.000
JUMLAH		Rp	250.000.000

Sekretaris
 BPKAD Kota Samarinda,

 IBROHIM, SE, M.Si
 NIP. 19650502 198902 1 004

Pejabat Fungsional
 BPKAD Kota Samarinda,

 WIDIASARI AGUSTINI, SE, M.Si
 NIP. 19670801 200003 2 006



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARGARETHA THERESIANA, SE**
Jabatan : Pejabat Fungsional
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **IBROHIM, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004

PIHAK PERTAMA,

MARGARETHA THERESIANA, SE
NIP. 19750401 200112 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 orang
		2.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 orang
		3.	Jumlah Lap.Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Peny.Lap.Keuangan Akhir tahun SKPD	7 laporan
		4.	Jumlah Lap.Fasilitas Kunjungan Tamu	10 rombongan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.244.319.442	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	31.654.456.177
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	2.539.863.265
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	50.000.000
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.000.000	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	250.000.000
JUMLAH		Rp	34.494.319.442

Sekretaris
BPKAD Kota Samarinda,



IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004

Pejabat Fungsional
BPKAD Kota Samarinda,



MARGARETHA THERESIANA, SE
NIP. 19750401 200112 2 004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZUHERYANSYAH, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **IBROHIM, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024



PIHAK KEDUA,

IBROHIM, SE, M.Si

NIP. 19650502 198902 1 004

PIHAK PERTAMA,

ZUHERYANSYAH, SE

NIP. 19750118 200701 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1. Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen (murni & perubahan)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 3.038.679.400
	-	
JUMLAH		Rp 3.038.679.400

Kepala
 BPKAD Kota Samarinda,

 IBROHIM, SE, M.Si
 NIP. 19650502 198902 1 004

Kepala Bidang Anggaran
 BPKAD Kota Samarinda,

 ZUHERYANSYAH, SE
 NIP. 19750118 200701 1 016



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, MM**
Jabatan : Sub. Bidang Anggaran 1
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **ZUHERYANSYAH, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024



PIHAK KEDUA,

ZUHERYANSYAH, SE
NIP. 19750118 200701 1 016

PIHAK PERTAMA,

ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, MM
NIP. 19670801 200003 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen
		2.	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen
		3.	Jumlah RKA – SKPD yang Diverifikasi	1 Aplikasi
		4.	Jumlah Perubahan RKAP – SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
		5.	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Regulasi

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH			
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.568.288.100	
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp	187.872.200
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp	181.770.100
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Rp	325.608.100
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp	128.949.200
	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp	744.088.500
JUMLAH		Rp	1.568.288.100

Kepala Bidang Anggaran
BPKAD Kota Samarinda,



ZUHERYANSYAH, SE
NIP. 19750118 200701 1 016

Sub. Bidang Anggaran 1
BPKAD Kota Samarinda,

ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, MM
NIP. 19720219 200701 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SILVANUS MARANTIKA, SE, MM**
Jabatan : Sub. Bidang Anggaran 2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **ZUHERYANSYAH, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



ZUHERYANSYAH, SE
NIP. 19750118 200701 1 016


SILVANUS MARANTIKA, SE, MM
NIP. 19770715 200801 1 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Jumlah DPA – SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
		2.	Jumlah Perubahan DPAP- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
		3.	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Perda dan Perwali
		4.	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda dan Perwali
		5.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 SKPD

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH			
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.470.391.300	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Rp	109.694.400
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	Rp	58.733.300
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp	347.149.500
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp	281.887.500
	- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp	672.926.600
JUMLAH		Rp	1.470.391.300



 Kepala Bidang Anggaran
 BPKAD Kota Samarinda,

ZUHERYANSYAH, SE
 NIP. 19750118 200701 1 016

Sub. Bidang Anggaran 2
 BPKAD Kota Samarinda,

SILVANUS MARANTIKA, SE, MM
 NIP. 19770715 200801 1 022



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CAHYA ERNAWAN, AK.,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : IBROHIM, SE,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



IBROHIM, SE, M.Si

NIP. 19650502 198902 1 004

PIHAK PERTAMA,

CAHYA ERNAWAN, AK., M.Si
NIP. 19751215 199601 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku Laporan Keuangan
		2.	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPD	3 Jenis Laporan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp.	2.018.362.250
2.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp.	737.325.500
JUMLAH		Rp.	2.755.687.750

Kepala
 BPKAD Kota Samarinda,

 IBROHIM SE, M.Si
 NIP. 19650502 198902 1 004

Kepala Bidang Akuntansi
 BPKAD Kota Samarinda,

 CAHYA ERNAWAN, AK., M.Si
 NIP. 19751215 199601 1 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SHISKA MELIANA, SE**
Jabatan : Sub. Bidang Akuntansi 1
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **CAHYA ERNAWAN, AK.,M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



CAHYA ERNAWAN, Ak.,M.Si
NIP. 19751215 199601 1 001

PIHAK PERTAMA,


SHISKA MELIANA, SE
NIP. 19750506 200502 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan
		2.	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	34 Laporan
		3.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		580.842.750
	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp	✓ 315.617.750
	- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset ,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan , Pendapatan –LO dan Beban	Rp	✓ 159.135.000
	- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Rp	106.090.000 ✓
JUMLAH		Rp	580.842.750

Kepala Bidang Akuntansi
 BPKAD Kota Samarinda,

CAHYA ERNAWAN, Ak.,M.Si
 NIP. 19751215 199601 1 001



Sub. Bidang Akuntansi 1
 BPKAD Kota Samarinda,

SHISKA MELIANA, SE
 NIP. 19750506 200502 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RITA DAMAYANTY, SE, Ak**
Jabatan : Sub. Bidang Akuntansi 2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **CAHYA ERNAWAN, AK.,M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 24 Februari 2024

PIHAK KEDUA,


CAHYA ERNAWAN, Ak.,M.Si
NIP. 19751215 199601 1 001

PIHAK PERTAMA,


RITA DAMAYANTY, SE, Ak
NIP. 19820805 201101 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

No	STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1. Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan
		2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Sidang dan 4 laporan
		3. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Buku
		4. Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Regulasi
		5. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan
		6. Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	10 BLUD

No	PROGRAM	ANGSARAN	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.437.519.500	
	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	424.360.000
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp	53.045.000
	- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp	106.090.000

	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp	111.394.500
	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp	530.450.000
	- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Rp	212.180.000
JUMLAH		Rp	1.437.519.500

Kepala Bidang Akuntansi
BPKAD Kota Samarinda,



CAHYA ERNAWAN, Ak.,M.Si
NIP. 19751215 199601 1 001

Sub.Bidang Akuntansi 2
BPKAD Kota Samarinda,

RITA DAMAYANTY, SE, Ak
NIP. 19820805 201101 2 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURFITRIA ARISANTI, SE, MM.
Jabatan : Pejabat Fungsional
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : IBROHIM, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK PERTAMA,

NURFITRIA ARISANTI, SE, MM.
NIP. 19730623 199403 2 006

PIHAK KEDUA,



IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan
		2.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Laporan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	737.325.500	
	- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp	368.662.750
	- Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Rp	368.662.750
JUMLAH		Rp	737.325.500

Kepala
BPKAD Kota Samarinda,



Pejabat Fungsional
BPKAD Kota Samarinda,

NURFITRIA ARISANTI, SE, MM
NIP. 19730623 199403 2 006



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMADI Y. SAHIBOEL, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : IBROHIM, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024



PIHAK PERTAMA,

AHMADI Y. SAHIBOEL, SE, M.Si
NIP. 19670717 199403 1 009

C

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis buku

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp	2.831.044.440
	-		-
JUMLAH		Rp	2.831.044.440

Kepala
BPKAD Kota Samarinda,



IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004

Kepala Bidang Perbendaharaan
BPKAD Kota Samarinda,

AHMADI Y.SAHIBOEL, SE, M.Si
NIP. 19670717 199403 1 009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota, Telp. 0541-733926 Fax. 0541-733986

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI HARTATI UTAMI, SE, MM
Jabatan : Sub. Bidang Perbendaharaan 1
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : AHMADI Y. SAHIBOEL, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



AHMADI Y. SAHIBOEL, SE, M.Si
NIP. 19670717 199403 1 009

PIHAK PERTAMA,

SRI HARTATI UTAMI, SE, MM
NIP. 19730308 200112 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	40 OPD
		2.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Laporan
		3.	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Laporan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	979.764.490	
	- Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp	370.890.640
	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp	179.209.350
	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp	429.664.500
JUMLAH		Rp	979.764.490

Kepala Bidang Perbendaharaan
BPKAD Kota Samarinda,

AHMADI Y. SAHIBOEL, SE, M.Si
NIP. 19670717 199403 1 009

Sub.Bidang Perbendaharaan 1
BPKAD Kota Samarinda,

SRI HARTATI UTAMI, SE, MM
NIP. 19730308 200112 2 002





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AIDI FADLI, SE, M.Si**
Jabatan : Sub. Bidang Perbendaharaan 2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **AHMADI Y. SAHIBOEL, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

AHMADI Y. SAHIBOEL, SE, M.Si
NIP. 19670717 199403 1 009

PIHAK PERTAMA,

AIDI FADLI, SE, M.Si
NIP. 19700317 199308 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Laporan
		2. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan
		3. Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Laporan
		4. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan
		5. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan
		6. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Laporan
		7. Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.	1 Dokumen

		8.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Perwali
--	--	----	--	-----------

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1.851.279.950
	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp	53.045.000
	- Pengelolaa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp	53.045.000
	- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp	53.045.000
	- Koordinasi ,Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp	658.754.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah , laporan Aliran Kas Daerah dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan Fihak Ketiga (PFK)	Rp	106.090.000
	- Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas ,Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Rp	53.045.000
	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitandengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban sub.Kegiatan	Rp	715.120.950
	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp	159.135.000
JUMLAH		Rp	1.851.279.950

Kepala Bidang Perbendaharaan
BPKAD Kota Samarinda,



Ahmadi

AHMADI Y.SAHIBOEL, SE, M.Si
NIP. 19670717, 199403 1 009

Sub. Bidang Perbendaharaan 2
BPKAD Kota Samarinda,



AIDI FADLI, SE, M.Si
NIP. 19700317 199308 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI REZKY FITRIANA F.,SE**
Jabatan : Pejabat Fungsional
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **IBROHIM, SE.,M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

ANDI REZKY FITRIANA F.,SE
NIP. 19880515 201503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Persentase Rekonsiliasi Penerimaan	100 %
		2.	Persentase Terlaksananya Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer BOSP	100%
		3.	Persentase Terlaksananya Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Non RKUD	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
1.			
	-		

Kepala
 BPKAD Kota Samarinda,

 IBROHIM, SE, M.Si
 NIP. 19650502 198902 1 004



Pejabat Fungsional
 BPKAD Kota Samarinda,

 ANDI REZKY FITRIANA F.,SE
 NIP. 19880515 201503 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSDIANSYAH S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Aset
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **IBROHIM , SE,M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



F. IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004

PIHAK PERTAMA,

YUSDIANSYAH S.Sos, MM
NIP. 19710824 199203 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
PRORAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah		74.998.000.000
	-		-
JUMLAH		Rp	74.998.000.000

Kepala
BPKAD Kota Samarinda,

Kepala Bidang Aset
BPKAD Kota Samarinda,



H. IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004

YUSDIANSYAH S.Sos, MM
NIP. 19710824 199203 1 007



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENY WARDHANA, SE**

Jabatan : Sub. Bidang Aset 1

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **YUSDIANSYAH ,S.Sos.,MM**

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



YUSDIANSYAH S.Sos, MM
NIP. 19710824 199203 1 007

PIHAK PERTAMA,

DENY WARDHANA, SE
NIP. 19811019 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	47 OPD
		2.	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Regulasi Daerah
		3.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
		4.	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 sertifikat tanah & 60 Patok Tanah

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	70.421.415.000
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp	26.350.727.000
	- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	216.169.000
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp	15.141.791.000
	- Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp	28.712.728.000
JUMLAH		Rp	70.421.415.000



Kepala Bidang Aset
BPKAD Kota Samarinda,

YUSDIANSYAH S.Sos, MM
NIP. 19710824 199203 1 007

Sub. Bidang Aset 1
BPKAD Kota Samarinda,

DENY WARDHANA, SE
NIP. 19811019 200701 1 009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSITA KUSUMA SARI, S.IP., M.Si**
Jabatan : Sub. Bidang Aset 2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **YUSDIANSYAH ,S.Sos.,MM**
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



YUSDIANSYAH S.Sos, MM
NIP. 19710824 199203 1 007

PIHAK PERTAMA,

ROSITA KUSUMA SARI, S.IP., M.Si
NIP. 19871008 200701 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1. Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan
		2. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Daftar
		3. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Laporan & 2500 BMD
		4. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen
		5. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Dokumen

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	4.567.585.000
	- Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp	441.495.000
	- Penilaian Barang Milik Daerah	Rp	2.328.860.000
	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Rp	472.645.000
	- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp	435.505.000
	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp	898.080.000
JUMLAH		Rp	4.576.585.000

Kepala Bidang Aset
BPKAD Kota Samarinda,



YUSDIANSYAH S.Sos, MM
NIP. 19710824 199203 1 007

Sub. Bidang Aset 2
BPKAD Kota Samarinda,

ROSITA KUSUMA SARI, S.IP., M.Si
NIP. 19871008 200701 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YULISTIAWATI, SE.,M.Si**
Jabatan : Pejabat Fungsional
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **IBROHIM ,SE.,M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004

PIHAK PERTAMA,

YULISTIAWATI, SE.,M.Si
NIP. 19710717 200701 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Terlaksananya Urusan Pengelolaan dalam Pemanfaatan dan Penatausahaan	100 %
		2.	Terlaksananya Kebijakan dalam Proses Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
	-		

Kepala
 BPKAD Kota Samarinda,

 IBROHIM, SE, M.Si
 NIP. 19650502 198902 1 004

Pejabat Fungsional
 BPKAD Kota Samarinda,

 YULISTIAWATI, SE.,M.Si
 NIP. 19710717 200701 2 014



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode Pos 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHIDAH**
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **ASMIRANDA MARLINA, SE ., M.Si**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA,



ASMIRANDA MARLINA, SE., M.Si
NIP. 19800312 200701 2 007

PIHAK PERTAMA,

WAHIDAH
NIP. 19770727 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	1.	Penyampaian Laporan Kepada Atasan Surat Masuk dan Keluar	100%
		2.	Publish Data yang Diupload Aplikasi PPID	100 %
		3.	Pengisian Aplikasi Kepegawaian	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
JUMLAH			

Kasubbag Umum
 BPKAD Kota Samarinda,



ASMIRANDA MARLINA, SE.,M.Si
 NIP.19800312 200701 2 007

Pengadministrasi Kepegawaian
 BPKAD Kota Samarinda,

WAHIDAH
 NIP. 19770727 199603 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121

<https://samarindakota.go.id>

Email: info@samarindakota.go.id

LEMBAR ASISTENSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024


Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal Asistensi : 26-03-2024

Kriteria	Catatan
Kesesuaian Format Penyusunan	OK
Keselaran dengan Dokumen Perencanaan	OK, Sesuai Renstra & Duk Iku PD
Indikator Berorientasi Outcome	OK


Diasistensi Oleh,


M. Rizky Nugraha

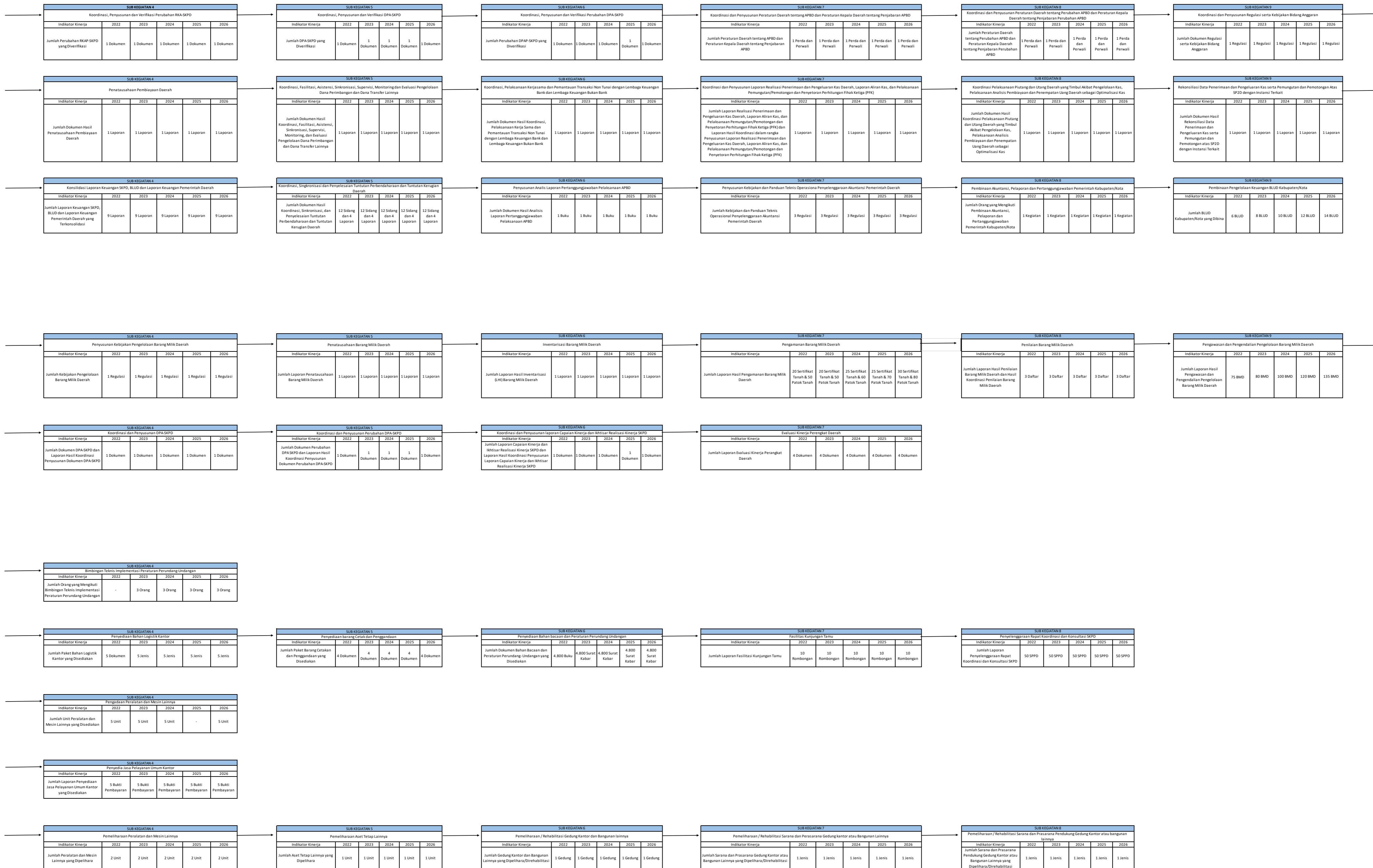
Perangkat Daerah

BPKAD

Eka Listika Ayu-N

Mengetahui,
Ketua Tim


Muhammad Rizky Nugraha, S.Kom
NIP. 199304272015031001





SUB KEGIATAN 10					
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD

SUB KEGIATAN 10					
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					
Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

SUB KEGIATAN 11					
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					
Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Perwali	1 Perwali	1 Perwali	1 Perwali	1 Perwali

SUB KEGIATAN 10					
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					
Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Laporan & 3000 BMD	3 Laporan & 3000 BMD	3 Laporan & 2500 BMD	3 Laporan & 2000 BMD	3 Laporan & 1500 BMD

SUB KEGIATAN 11					
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	47 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD

SUB KEGIATAN 12					
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen